

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI TPS 3R GIRI MULYA DI DESA GIRIREJO KABUPATEN MAGELANG

Uswatun Hasanah¹, Dewi Erowati²

Email: uus04548@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedaro, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang memerlukan kebijakan publik yang efektif di tingkat lokal. Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Giri Mulya sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut serta menganalisis distribusi manfaat kebijakan terhadap aktor yang terlibat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa, pengelola TPS 3R, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data dilakukan menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya telah berjalan namun belum optimal. Kebijakan ini berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah desa serta meningkatkan kebersihan lingkungan pada wilayah yang telah terlayani. Namun, masyarakat di dusun yang belum terjangkau layanan belum merasakan manfaat kebijakan secara optimal karena keterbatasan cakupan layanan dan kapasitas operasional TPS 3R. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat kebijakan antar aktor dan wilayah masih belum merata.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, pengelolaan sampah, TPS 3R, aktor kebijakan

ABSTRACT

Waste management is an environmental issue that requires effective public policy at the local level. Girirejo Village, Ngablak District, Magelang Regency implements a waste management policy through the Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Facility (TPS 3R) Giri Mulya as a community-based initiative. This study aims to evaluate the implementation of this policy and analyze the distribution of its benefits among the actors involved. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the village government, TPS 3R managers, and community members as service users. The analysis applies William N. Dunn's policy evaluation indicators, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the waste management policy through TPS 3R Giri Mulya has been implemented but has not yet achieved optimal results. The policy strengthens village waste management institutions and improves environmental cleanliness in areas that receive services. However, communities in hamlets that are not yet covered by waste collection services have not fully experienced these benefits due to limited service coverage and operational capacity. These findings show that although the policy generates environmental and institutional benefits, the distribution of benefits across actors and areas remains uneven.

Keywords: *policy evaluation, waste management, TPS 3R, policy actors*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks dan menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan volume timbunan sampah terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila tidak dikelola secara efektif, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Secara nasional, timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 35,01 juta ton per tahun, namun hanya sekitar 38,78% yang berhasil dikelola secara optimal (KLHK, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sistem pengelolaan sampah masih belum sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Di tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan volume timbunan sampah yang cukup tinggi, dengan produksi sampah mencapai sekitar 4,9 juta ton per tahun. Kabupaten Magelang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi persoalan serupa dengan timbunan sampah sekitar 668,71 ton per hari atau 244.077,51 ton per tahun.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendorong penerapan pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah dari sumbernya serta meningkatkan pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai guna (Trisnawati & Agustana, 2018). Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam konteks ini, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Giri Mulya yang berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Girirejo.

Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan sampah telah diterapkan, implementasinya di tingkat lokal tidak selalu berjalan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidakseimbangan antara volume timbunan sampah dengan kapasitas pengelolaan (Hardiyanti & Purnaweni, 2020; Janatun et al., 2023). Dalam konteks Desa Girirejo, TPS 3R Giri Mulya bahkan telah memperoleh berbagai penghargaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun demikian, penghargaan tersebut belum tentu sepenuhnya merepresentasikan keberhasilan implementasi kebijakan dalam

mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dalam praktik pengelolaan sampah di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Penelitian kualitatif berupaya memahami realitas sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, narasi, serta hasil pengamatan lapangan (Moleong, 2009; Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Desa Girirejo, BUMDes Girirejo, serta unit pengelola TPS 3R Giri Mulya yang menjadi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa berdasarkan Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan

secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa, pengelola BUMDes, unit pengelola TPS 3R, serta masyarakat sebagai penerima layanan pengelolaan sampah, dengan total informan sebanyak 11 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian serta observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan sampah di TPS 3R Giri Mulya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen pendukung seperti peraturan desa, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi TPS 3R Giri Mulya untuk mengamati kondisi fasilitas serta praktik pengelolaan sampah yang berlangsung. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen tertulis, laporan kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Desa Girirejo.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola, hubungan, serta interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui TPS 3R Giri Mulya

Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo dianalisis menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 mampu mencapai tujuan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara optimal.

1. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah

Efektivitas kebijakan menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan TPS 3R Giri Mulya telah memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sistem pengelolaan sampah di Desa Girirejo. Sebelum keberadaan TPS 3R, masyarakat cenderung membuang sampah secara sembarangan ke sungai, kebun, atau membakarnya secara mandiri. Setelah TPS 3R beroperasi, pengelolaan sampah menjadi lebih terstruktur melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah.

Dari sisi pemerintah desa dan pengelola TPS 3R, kebijakan ini dinilai mampu menurunkan praktik pembuangan sampah liar serta meningkatkan kebersihan lingkungan desa. Sampah rumah tangga yang sebelumnya menumpuk kini dapat diangkut secara rutin dan sebagian diolah menjadi kompos maupun produk olahan lainnya. Selain itu, inovasi pengolahan residu seperti pemanfaatan abu styrofoam untuk campuran paving menunjukkan adanya upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumber serta keterbatasan cakupan layanan TPS 3R yang belum menjangkau seluruh dusun. Dengan demikian, kebijakan telah efektif dalam menghasilkan

layanan pengelolaan sampah, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat secara merata.

2. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan

Efisiensi kebijakan berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo, sumber daya utama yang digunakan meliputi tenaga kerja, fasilitas pengolahan sampah, armada pengangkutan, serta dukungan anggaran dari pemerintah desa.

TPS 3R Giri Mulya saat ini dijalankan oleh sepuluh tenaga kerja dengan pembagian tugas pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Selain itu, fasilitas seperti mesin pencacah, mesin pengayak, alat pembakaran, serta armada pengangkut telah tersedia dan digunakan dalam operasional sehari-hari. Penggunaan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah mampu menghasilkan output berupa layanan pengelolaan sampah yang berjalan secara fungsional.

Meskipun demikian, efisiensi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah tenaga kerja dan armada pengangkut yang menyebabkan layanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah desa secara optimal. Selain itu, kondisi cuaca dan fluktuasi volume sampah juga sering mempengaruhi konsistensi jadwal pengangkutan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya yang

tersedia telah dimanfaatkan secara rasional, kapasitas operasional yang terbatas masih mempengaruhi tingkat efisiensi kebijakan.

3. Kecukupan Hasil Kebijakan

Kecukupan kebijakan menunjukkan sejauh mana hasil kebijakan mampu menjawab permasalahan yang melatarbelakangi perumusan kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan TPS 3R Giri Mulya telah memberikan hasil yang cukup signifikan dalam mengurangi permasalahan sampah di Desa Girirejo, terutama terkait praktik pembuangan sampah sembarangan dan penumpukan sampah di lingkungan permukiman.

Masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam pembuangan sampah melalui penyediaan tempat sampah dan layanan pengangkutan yang lebih teratur. Selain itu, kegiatan pengolahan sampah yang menghasilkan produk seperti kompos, pupuk cair, dan papan komposit menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga pada pemanfaatan sampah sebagai sumber nilai ekonomi.

Namun demikian, hasil kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencukupi untuk mengatasi seluruh permasalahan sampah. Beberapa jenis sampah seperti popok bayi, pembalut, dan plastik tertentu masih sulit diolah, sementara cakupan layanan TPS 3R belum menjangkau seluruh dusun di Desa Girirejo. Oleh karena itu, meskipun kebijakan telah memberikan hasil yang cukup signifikan, kapasitas pengelolaan

sampah masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab permasalahan secara lebih menyeluruh.

4. Pemerataan Manfaat Kebijakan

Pemerataan kebijakan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat secara adil. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo, pemerataan manfaat kebijakan masih menjadi tantangan utama.

Masyarakat di dusun yang telah terlayani layanan TPS 3R menilai bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kebersihan lingkungan serta mempermudah pembuangan sampah rumah tangga. Namun, masih terdapat beberapa dusun yang belum terjangkau layanan TPS 3R karena keterbatasan kapasitas operasional, baik dari segi armada pengangkut maupun tenaga kerja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata di seluruh wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya perluasan cakupan layanan serta peningkatan kapasitas operasional TPS 3R agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat Desa Girirejo.

5. Responsivitas Pelaksanaan Kebijakan

Responsivitas kebijakan menunjukkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam merespons kebutuhan, aspirasi, serta keluhan masyarakat. Dalam pelaksanaan

kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo, responsivitas pemerintah desa dan pengelola TPS 3R terlihat melalui berbagai upaya evaluasi dan perbaikan layanan yang dilakukan secara berkala.

Pemerintah desa berperan dalam menampung aspirasi masyarakat melalui forum-forum kemasyarakatan di tingkat dusun, yang kemudian disampaikan kepada pengelola TPS 3R sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ketika terdapat keluhan terkait keterlambatan pengangkutan sampah, pemerintah desa juga melakukan evaluasi bersama pengelola TPS 3R untuk memperbaiki sistem layanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah memiliki mekanisme respons terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun dalam praktiknya respons tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya operasional.

6. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks Desa Girirejo, kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya dinilai tepat karena mampu menjawab permasalahan utama terkait pengelolaan sampah rumah tangga yang sebelumnya tidak tertangani secara sistematis.

Melalui penerapan sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah berbasis masyarakat, kebijakan ini mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terorganisir serta

mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, integrasi pengelolaan sampah dengan kegiatan ekonomi melalui pengolahan kompos dan produk daur ulang menunjukkan bahwa kebijakan memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Meskipun demikian, ketepatan kebijakan masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas operasional TPS 3R, perluasan cakupan layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama berasal dari dukungan kelembagaan pemerintah desa melalui Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan. Selain itu, dukungan anggaran desa dan peran BUMDes dalam pengelolaan operasional TPS 3R turut membantu menjaga keberlangsungan program pengelolaan sampah di tingkat desa. Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya partisipasi sebagian masyarakat yang telah memanfaatkan layanan pengangkutan sampah serta mulai terlibat dalam pengelolaan sampah yang lebih tertib.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas operasional, seperti jumlah tenaga kerja, armada pengangkut, serta fasilitas pengolahan sampah yang masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan layanan TPS 3R belum dapat menjangkau seluruh dusun secara merata. Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum merata serta adanya kendala teknis operasional seperti fluktuasi volume sampah dan kondisi cuaca juga mempengaruhi konsistensi layanan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas operasional dan perluasan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R Giri Mulya di Desa Girirejo menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kebersihan lingkungan serta mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan. Namun, berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas operasional, seperti jumlah armada, tenaga kerja, serta cakupan layanan yang belum menjangkau seluruh dusun di Desa Girirejo. Akibatnya, manfaat kebijakan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat di

wilayah yang telah terlayani, sementara sebagian wilayah lainnya belum memperoleh akses layanan secara merata. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa dukungan kelembagaan pemerintah desa, keberadaan regulasi desa, serta partisipasi masyarakat yang mulai berkembang. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya operasional dan variasi tingkat partisipasi masyarakat antar dusun masih mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.

SARAN

Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Girirejo, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat dukungan kelembagaan dan penganggaran guna meningkatkan kapasitas operasional TPS 3R, terutama melalui penambahan armada, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan cakupan layanan secara bertahap ke seluruh dusun. Selain itu, pengelola TPS 3R perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional dan dokumentasi kegiatan sebagai dasar evaluasi kinerja. Partisipasi masyarakat juga perlu terus diperkuat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R agar keberlanjutan kebijakan dapat terjaga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dan menggunakan data operasional yang lebih komprehensif guna memperoleh

analisis evaluasi kebijakan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Hardiyanti, K., & Purnaweni, H. (2020). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak*. 1(3), 113–123.
- Janatun, M., Rosiana, I., Reza, R. K., & Darmawan, I. (2023). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung*. 2(3), 159–166.
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2024). *Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <https://www.kehutanan.go.id>
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trisnawati, L. E., & Agustana, P. (2018). *Manajemen Pengelolaan Sampah Melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle) di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng*. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 75–88. <https://doi.org/10.37637/locus.v9i1.81>